



PEMERINTAH
KABUPATEN
BANTUL



**PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 75 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2020**



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR **15** TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 109);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 107);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 68);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Daerah adalah Kabupaten Bantul
4. Bupati adalah Bupati Bantul.

BAB II SISTEMATIKA RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renja PD Tahun 2020 ini menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kegiatan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2020.
- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Bab I : Pendahuluan;
 - b. Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;
 - c. Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
 - d. Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
 - e. Bab V : Penutup.

Pasal 3

- (1) Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat (1) terdiri atas:
 - a. Rencana Kerja Sekretariat Daerah;
 - b. Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Rencana Kerja Inspektorat Daerah;
 - d. Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati;
 - e. Rencana Kerja Badan Daerah;
 - f. Rencana Kerja Dinas Daerah;
 - g. Rencana Kerja Kantor Daerah; dan
 - h. Rencana Kerja Kecamatan.
- (2) Rencana Kerja Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
 - a. Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

- b. Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
 - c. Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah; dan
 - d. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (3) Rencana Kerja Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f. terdiri atas:
- a. Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
 - b. Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
 - c. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - d. Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang;
 - e. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
 - f. Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - g. Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - h. Rencana Kerja Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
 - i. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
 - j. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - k. Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - l. Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
 - m. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - n. Rencana Kerja Dinas Perdagangan;
 - o. Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian;
 - p. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
 - q. Rencana Kerja Dinas Kebudayaan;
 - r. Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
 - s. Rencana Kerja Dinas Pariwisata.
- (4) Rencana Kerja Kantor Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g adalah Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (5) Rencana Kerja Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, terdiri atas:
- a. Rencana Kerja Kecamatan Srandakan;
 - b. Rencana Kerja Kecamatan Sanden;
 - c. Rencana Kerja Kecamatan Pajangan;
 - d. Rencana Kerja Kecamatan Sedayu;
 - e. Rencana Kerja Kecamatan Pandak;
 - f. Rencana Kerja Kecamatan Kasihan;
 - g. Rencana Kerja Kecamatan Bantul;
 - h. Rencana Kerja Kecamatan Bambanglipuro;

- i. Rencana Kerja Kecamatan Kretek;
- j. Rencana Kerja Kecamatan Pundong;
- k. Rencana Kerja Kecamatan Sewon;
- l. Rencana Kerja Kecamatan Jetis;
- m. Rencana Kerja Kecamatan Imogiri;
- n. Rencana Kerja Kecamatan Dlingo;
- o. Rencana Kerja Kecamatan Pleret;
- p. Rencana Kerja Kecamatan Banguntapan; dan
- q. Rencana Kerja Kecamatan Piyungan.

Pasal 4

Uraian rinci Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 10 juli 2019

↓ BUPATI BANTUL, f

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2019 NOMOR

BAB V

PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2020. Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul serta berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 dan mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kegiatan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2020. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode tahun 2020. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Perangkat Daerah akan melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.

BUPATI BANTUL, 
SUHARSONO

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul menyusun Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2020 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang. Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2020 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2016-2021 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020.

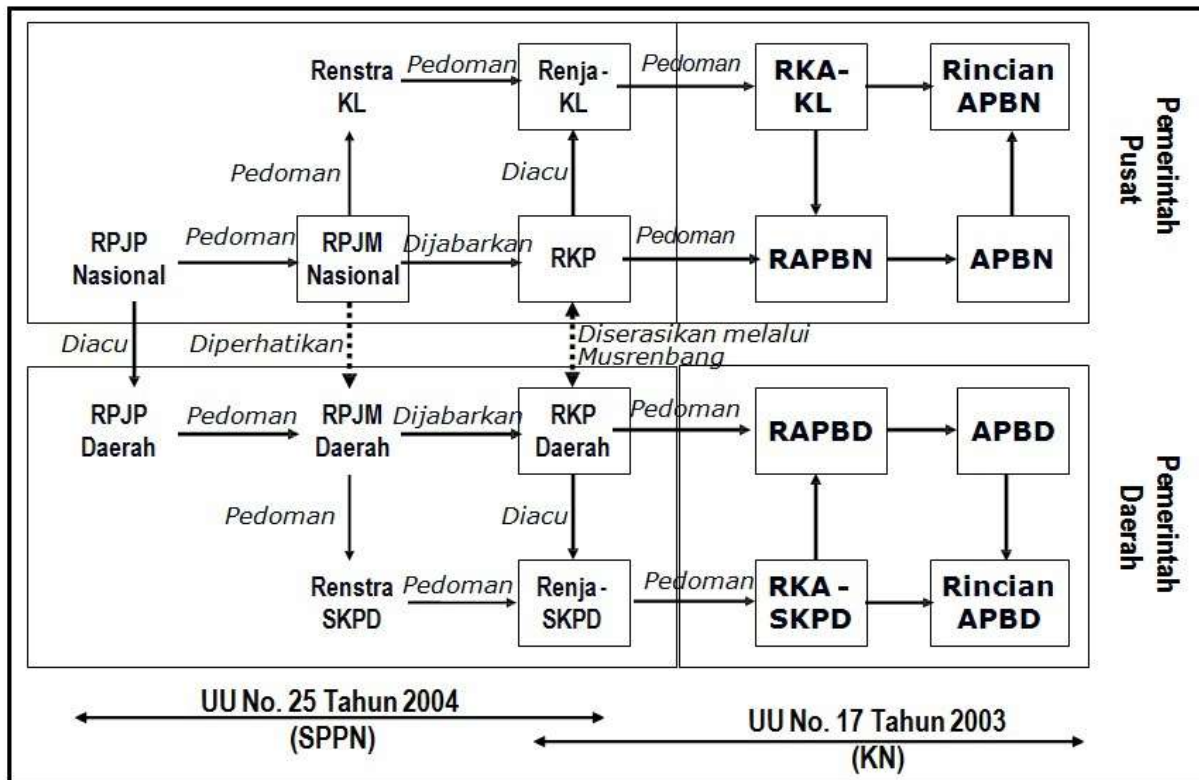
Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2020 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Persiapan penyusunan,
- b. Penyusunan rancangan awal,
- c. Penyusunan rancangan,
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
- e. Perumusan rancangan akhir, dan
- f. Penetapan.

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah. Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020;

- e. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 111 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul;
- j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021;
- k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2020 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul dalam penyusunan RKA Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2020. Adapun tujuan disusunnya Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2020 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2020 yang

akan dilaksanakan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II.
HASIL EVALUASI RENCANA RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan perkiraan capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2019.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2018, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kinerja program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor penyebab tidak tercapainya adalah:

Tabel 2.1

Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang
Direncanakan Dan Faktor-Faktor Penyebabnya

No	Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penyebab
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Kegiatan penyediaan rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi	Kinerja jumlah perjalanan dinas luar daerah dan jamuan tamu tidak tercapai karena undangan keluar daerah DIY yang tidak begitu signifikan dan jamuan tamu hanya dipergunakan untuk menanggapi tamu yang berkunjung ke DPTR Bantul sehingga tidak dapat dipastikan jumlahnya
2	Program penataan, penguasaaan, pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah/Kegiatan Persertifikatan dan sewa tanah pemerintah DIY	Terkendala pemberkasan di desa maupun BPN dalam proses pendaftarannya
3	Program penataan, penguasaaan, pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah/Kegiatan persertifikatan tanah warga (PRODA)	Berkas belum bisa di SPS dikarenakan untuk pembayaran pendaftarannya sudah ditutup di awal bulan November

2. Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung terpenuhinya adalah:

Tabel 2.2

Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang
Direncanakan Dan Faktor-Faktor Pendukungnya

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan perkantoran	Ketersediaan dana dan SDM
2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Kegiatan Penyediaan jasa pengelolaan pelayanan perkantoran	Ketersediaan dana dan SDM
3	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur/ Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Ketersediaan dana dan SDM
4	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur/ Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Ketersediaan dana dan SDM
5	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur/ Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Ketersediaan dana dan SDM
6	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur/ Kegiatan pengadaan peralatan dan perlengkapan	Ketersediaan dana dan SDM
7	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur/ Kegiatan Pengembangan Kapasitas sumber daya aparatur	Ketersediaan dana dan SDM
8	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan/ Kegiatan Penyusunan laporan keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Ketersediaan dana dan SDM
9	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan/ Kegiatan pemutakhiran data	Ketersediaan dana dan SDM
10	Program penataan, penguasaan, pemilikan penggunaan dan	Ketersediaan dana dan SDM

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
	pemanfaatan tanah/ Kegiatan inventarisasi tanah kas desa	
11	Program penataan, penguasaan, pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah/ Kegiatan Pemanfaatan tanah SG	Ketersediaan dana dan SDM
12	Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan/ Kegiatan Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Ketersediaan dana dan SDM
13	Program Perencanaan Tata Ruang/ Kegiatan Penyusunan kebijakan tentang penyusunan rencana tata ruang	Ketersediaan dana dan SDM
14	Program Perencanaan Tata Ruang/ Kegiatan Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK dan RTBL	Ketersediaan dana dan SDM
15	Program Perencanaan Tata Ruang/ Kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang	Ketersediaan dana dan SDM
16	Program Perencanaan Tata Ruang/ Kegiatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	Ketersediaan dana dan SDM
17	Program Perencanaan Tata Ruang/ Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan	Ketersediaan dana dan SDM
18	Program Perencanaan Tata Ruang/ Kegiatan Penyusunan Rencana tata Bangunan dan Lingkungan	Ketersediaan dana dan SDM
19	Program Perencanaan Tata Ruang/ Kegiatan Studi tentang tata ruang	Ketersediaan dana dan SDM
20	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang/ Kegiatan penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang	Ketersediaan dana dan SDM
21	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang/ Pengembangan data pemanfaatan ruang	Ketersediaan dana dan SDM

3. Tidak ada Kinerja program/kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan.

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.1 dan Tabel 2.2 maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2020 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi intensif dengan *stake holder* terkait seperti pihak BPN dan pemerintah desa dalam pelaksanaan kegiatan.

2. Sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan persyaratan pemberkasan yang diperlukan dalam kegiatan sehingga meminimalisir target kegiatan tertunda karena berkas persyaratan yang tidak lengkap.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2018 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2018 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2019

Nama Perangkat Daerah: **Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul**

Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar								
Bidang Urusan Pertanahan								
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian nilai AKIP	Nilai	80	81,62	102,03	81	81	100
Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Jumlah Jenis ATK	Jenis ATK	24	24	100	20	20	100
	Jenis alat listrik dan elektronik	Jenis	20	20	100	11	11	100
	Jumlah belanja materai	Lembar	850	868	102	1600	1600	100
	Jenis peralatan kebersihan	Jenis	24	24	100	14	14	100
	Jumlah pengisian tabung gas	Kali	15	14	93	15	15	100
	Jumlah bulan pembayaran telepon	Bulan	12	12	100	12	12	100
	Jumlah bulan pembayaran air	Bulan	12	12	100	12	12	100
	Jumlah bulan pembayaran jasa listrik	Bulan	12	12	100	12	12	100
	Jumlah eksemplar pembayaran surat kabar	Eksemplar	24	24	100	12	12	100
	Jumlah bulan pembayaran jasa internet	Bulan	12	12	100	12	12	100
	Jumlah barang cetakan	Rim	100	49	49			
	Jumlah belanja penggandaan	Kegiatan	25	25	100			
	Jumlah Penggandaan	Lembar	356.825	353.293	99			
	Sampah terangkut	Kali	12	12	100			
	Partisipasi pameran dan karnaval	Kali	3	3	100			
	Spanduk, papan nama	Unit	30	26	87	11	11	100
	Konsumsi Rapat	Dos	200	681	341			
Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Tersedianya makan dan minum rapat	Dos	400	384	58,90	1200	1200	100
	Tercapainya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	OP	169	52	31	224	224	100

Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
	Tercapainya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	OP	643	321	50	947	947	100
	Tersedianya makan dan minum jamuan tamu	Orang				250	250	100
Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Belanja pegawai honor non PNS	OB	66	72	100	140	140	100
	Honoraarium pegawai kontrak ahli	OB	22	24	109			
	Honorarium tenaga operator komputer	OB	11	12	100			
	Honorarium pegawai kontrak (Resepsionis)	OB	11	12	100			
	Honorarium Arsiparis	OB	11	12	100			
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana	Persentase	100	100	100	100	100	100
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Unit	4	4	100	4	4	100
	Terpeliharanya pagar kantor	Unit	1	1	100	1	1	100
	Terpeliharanya halaman	Unit	1	1	100	1	1	100
	Terpeliharanya tempat parkir	Unit	2	2	100			
	Penggantian jaringan listrik	Unit				3	3	100
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Suku cadang dan jasa service dan pajak kendaraan	Kendaraan Dinas	17	17	100	17	17	100
	Belanja BBM	Liter	13.000	13.937	107	9000	9000	100
	Perpanjangan surat kendaraan dinas	Unit				17	17	100
Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpeliharanya Peralatan Kantor	Tahun	1	1	100	1	1	100
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Pengadaan filling kabinet	Unit	3	3	100			100
	Pengadaan tong sampah	Unit	5	5	100			
	Pengadaan laptop	Unit	3	3	100	1	1	100
	Pengadaan printer	Unit	3	3	100	3	3	100
	Pengadaan printer A3	Unit	2	2	100	1	1	100
	Pengadaan monitor LED	Unit	1	1	100	1	1	100
	Pengadaan Modem	Unit	1	1	100			
	Pengadaan Genset	Unit	1	1	100			

Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
	Pengadaan perlengkapan komputer	Jenis	1	1	100	6	6	100
	Pengadaan alat potong rumput	Unit	1	1	100			
	Pengadaan Aset Tetap Renovasi	Unit	1	1	100			
	Pengadaan kamera	Unit	1	1	100	1	1	100
	Pengadaan LCD Proyektor	Unit	1	1	100	1	1	100
	Pengadaan AC	Unit	4	4	100	1	1	100
	Pengadaan GPS	Unit	1	1	100	1	1	100
	Pegadaan Sound System	Unit	3	3	100	2	2	100
	Pengadaan almari	Unit				2	2	100
	Pengadaan rak buku	Unit				4	4	100
	Pengadaan kulkas	Unit				1	1	100
	Pengadaan IPAD	Unit				1	1	100
	Pengadaan server	Unit				1	1	100
	Pengadaan drone	Unit				1	1	100
	Pengadaan software	Unit				1	1	100
	Pengadaan meja rapat	Unit				30	30	100
	Pengadaan kursi rapat	Unit				55	55	100
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase	100	100	100			
Pengembangan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Terlaksananya Bimtek	OK	55	55	100			
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai Evaluasi kinerja	Nilai	80	89,38	111,73	83	83	100
Penyusunan laporan keuangan, barang, kepegawaian, dan ketatausahaan	Laporan Keuangan	Dokumen	12	12	100			100
	Tersusunnya Laporan Barang	Dokumen	12	12	100			
	Tersusunnya Dokumen SMM	Dokumen	1	1	100	1	1	100
	Jumlah honor pengelola keuangan	Ob				156	156	100
Pemutakhiran Data	Terwujudnya Software Arsip	Unit	1	1	100			100
	Jumlah arsip digital	Data				8	8	
Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Cakupan penyelenggaraan pelayanan pertanahan dan ruang	Persentase	88	93,16	105,86	96	96	100

Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
Inventarisasi tanah kas desa	Data base tanah desa	Desa	75	75	100	75	75	100
	Jumlah peserta sosialisasi	Orang				80	80	
Persetifikatan dan sewa tanah Pemerintah DIY	Kompensasi sewa tanah	Bidang	1	1	100			100
	pendaftaran tanah	Dokumen	88	18	20	64	64	100
	Jumlah peserta sosialisasi	Orang				200	200	100
Persetifikatan tanah warga (PRODA)	terdaftarnya tanah milik warga	Dokumen	100	66	66			
Pemanfaatan Tanah SG	Rekomendasi Bupati	Dokumen	30	30	100	17	17	100
Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Angka penanganan konflik pertanahan	Angka	10	10	100	15	15	100
penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Koordinasi dan peninjauan lokasi	Permasalahan	5	5	100	10	10	100
	Jumlah peserta sosialisasi konflik pertanahan	Orang				100	100	100
Urusan Wajib Pelayanan Dasar								
Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
Program Perencanaan Tata Ruang	Cakupan dokumen tata ruang yang sudah diperdakan	Dokumen	2	2	100	3	3	100
Penyusunan kebijakan tentang penyusunan rencana tata ruang	Raperda RTRW dan KLHS	Dokumen	2	2	100	1	1	100
Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL	Raperda RDTR	Dokumen	1	1	100	2	2	100
	Raperda KLHS	Dokumen	1	1				
Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang	sosialisasi tentang perundang-undangan tentang rencana tata ruang	Desa	4	4	100	4	4	100
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	Tersusunnya Dokumen RDTR dan PZ	Dokumen	2	2	100			
Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan	Dokumen Rencana Teknis Ruang Kawasan	Dokumen	1	1	100	1	1	100
Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan	Tersusunnya Dokumen RTBL dan Masterplan	Dokumen	6	6	100	3	3	100
Studi tentang Tata Ruang	Jumlah Penyusunan Dokumen RTH	Dokumen	1	1	100	1	1	100
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase efektifitas penyelenggaraan pengawasan	Persentase	72	72	100	75	75	100

Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
	dan pengendalian pemanfaatan tanah 4 dan ruang							
Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang	Terselenggaranya pemanfaatan ruang menjadi lebih terkendali	Dokumen	4	4	100			100
	Konsolidasi tanah	Bidang				100	100	100
	Pengendalian dan monitoring	Kecamatan				6	6	100
	Audit pemanfaatan tanah tahun 2018	Kecamatan				17	17	100
Pengembangan data pemanfaatan ruang	Tersosialisasinya Tupoksi Dinas	Kali	20	20	100			100
	Tersedianya Data Tanah Desa dan SG	Desa	5	5	100			
	Digitalisasi pengendalian pemanfaatan ruang					1	1	100
	Digitalisasi audit pemanfaatan ruang					1	1	100
	Pendataan aset penyerahan prasarana sarana dan utilitas (PSU) perumahan di 6 kecamatan					2	2	100
	Penyusunan konsep dan perancangan fasad sebagai citra kota Jl. Jenderal Sudirman					1	1	100

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dilakukan terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang yang telah ditetapkan.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap IKU Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2018, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Dinas Pertanahan dan Tata Ruang yang tidak memenuhi target adalah jumlah dokumen tata ruang yang sudah diperdakan dengan target 3 dokumen dengan realisasi 2 dokumen.

IKU tersebut tidak dapat memenuhi target disebabkan karena kebutuhan untuk melegalkan dokumen tata ruang dalam bentuk peraturan daerah yang memiliki kekuatan hukum menemui kendala dalam proses mendapat persetujuan dari Badan Informasi Geospasial (BIG) dan persetujuan substansi dari Gubernur DIY dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang yang memerlukan waktu dan proses lama.

2. IKU Dinas Pertanahan dan Tata Ruang yang dapat memenuhi target adalah persentase cakupan pengendalian tata ruang dengan target 72% dan realisasi 72%.

IKU tersebut sesuai target karena adanya komitmen dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang untuk mewujudkan pengendalian pemanfaatan ruang, semangat kerja dan motivasi SDM yang ada untuk mewujudkan pengendalian pemanfaatan ruang tinggi.

3. IKU Dinas Pertanahan dan Tata Ruang yang dapat melebihi target adalah cakupan sertifikasi tanah dengan capaian 105,86% dari target 88% mencapai realisasi 93,16%.

IKU tersebut dapat melebihi target karena didukung oleh program persertifikatan tanah di Kabupaten Bantul dengan bekerja sama dengan Polres Bantul, Kejari Bantul, Pemda Bantul, Kantor BPN, pamong desa dan tokoh masyarakat serta antusiasme masyarakat terkait program PTSL.

Sesuai hasil analisis terhadap IKU Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2018 tersebut, maka kebijakan/langkah-langkah yang perlu dilakukan pada Tahun 2020 supaya seluruh IKU yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut :

1. Lebih pro aktif dalam berkoordinasi dengan *stakeholder* terkait seperti Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BPN
2. Diperlukan percepatan proses penetapan dokumen tata ruang
3. Mempertahankan dan meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang
4. Adanya kerja sama dan koordinasi yang aktif dengan instansi terkait mengenai program pensertifikatan tanah

Secara lebih rinci, capaian IKU Dinas Pertanahan dan Tata Ruang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.5

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja		Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Target Kinerja			Catatan Analisis
		Tahun 2016	Tahun 2017			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	Jumlah dokumen tata ruang yang sudah diperdakan	-	2 dokumen	3 dokumen	2 dokumen	3 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	
2	Persentase cakupan pengendalian tata ruang	-	71%	72%	72%	75%	77%	80%	
3	Cakupan Sertifikasi Tanah	-	84%	88%	93,16%	92%	96%	100%	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pertanahan dan urusan tata ruang. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2018, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan sebagai berikut:

Tabel 2.6

Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Selama Tahun 2018

Permasalahan	Hambatan
Belum adanya sanksi tegas terhadap alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan RTRW dan RDTR	Kurangnya personil dalam pengawasan alih fungsi lahan
Komitmen antar <i>stakeholder</i> belum kuat	Lambatnya pengadministrasian pertanahan
Pemahaman masyarakat tentang pertanahan dan tata ruang	Kurangnya sosialisasi dan penyampaian informasi tentang pertanahan dan tata ruang
Lambatnya penetapan kebijakan terkait peraturan daerah tentang pertanahan dan tata ruang	Tahapan penyusunan peraturan yang panjang dan kompleks memperlambat proses penetapan Perda RDTR dan RTRW
Belum tertibnya administrasi pertanahan	Masih banyaknya permasalahan terkait dengan sengketa pertanahan

Selain itu, selama Tahun 2018, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.7

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2018

Peluang	Tantangan
Adanya kegiatan pengawasan dan monitoring terhadap pemanfaatan ruang	Kebutuhan personil tidak sejalan dengan kebijakan penerimaan sumber daya aparatur dan tenaga ahli bidang terkait
	Pengembangan sarana dan prasarana berbasis SIM geografi tata ruang dan pertanahan
Menjalin kerja sama dan koordinasi yang aktif antar instansi/ lembaga terkait	komunikasi dan tingkat kepentingan terhadap permasalahan pertanahan
Perlunya pembinaan kepada masyarakat perihal aspek pertanahan dan tata ruang	Penyampaian informasi pertanahan dan tata ruang yang tepat sasaran kepada masyarakat
Telah selesainya materi kajian perda RDTR dan RTRW	Benturan kepentingan terkait dengan isi rancangan peraturan daerah tentang RDTR dan RTRW

Peluang	Tantangan
Fasilitasi kegiatan penyelesaian sengketa permasalahan pertanahan dan kegiatan PTSL	Banyak tanah SG yang dikuasai masyarakat secara administrasi belum memiliki kekancingan
	Kasus tukar guling tanah SG dengan tanah warga
	Banyaknya tanah warga yang belum bersertifikat

Dengan memperhatikan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2018, maka isu-isu penting berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Pengendalian alih fungsi lahan yang sesuai peruntukan tata ruang
2. Pencapaian sertifikasi tanah 100%
3. Sosialisasi tentang peraturan pertanahan dan taat ruang
4. Pengembangan sistem informasi pertanahan dan tata ruang
5. Koordinasi dan penyempurnaan dengan pihak DIY dan Badan Informasi Geospasial (BIG) serta Kementerian Agrarian dan Tata Ruang untuk pemetaan rencana tata ruang.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2020. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.8

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar					Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar					
Bidang Urusan Pertanahan					Bidang Urusan Pertanahan					
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Bantul	Capaian nilai AKIP	82	1.465.640.111	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	82 angka	968.795.043,00	
Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Kab. Bantul	Jumlah ATK yang dibeli	20 jenis	451.607.116	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Kab. Bantul	Jumlah ATK	44 jenis	241.667.000,00	
	Kab. Bantul	Jumlah alat listrik dan elektronik yang dibeli	11 jenis			Kab. Bantul	Jumlah alat listrik dan elektronika	11 jenis		
	Kab. Bantul	Jumlah materai yang dibeli	1.600 lembar			Kab. Bantul	jumlah materai	820 lembar		
	Kab. Bantul	Jumlah peralatan kebersihan yang dibeli	14 jenis			Kab. Bantul	jumlah peralatan kebersihan	14 jenis		
	Kab. Bantul	Jumlah pengisian tabung gas	15 tabung			Kab. Bantul	jumlah pengisian tabung gas	10 kali		

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Kab. Bantul	Jumlah pembayaran jasa pengelola keuangan	156 ob			Kab. Bantul	jumlah pembayaran telepon, air, listrik, internet, surat kabar, sampah	12 kali		
	Kab. Bantul	Jumlah pembayaran langganan telepon	12 bulan			Kab. Bantul	pengadaan spanduk publikasi	10 unit		
	Kab. Bantul	Jumlah pembayaran langganan air	12 bulan							
	Kab. Bantul	Jumlah pembayaran langganan listrik	12 bulan							
	Kab. Bantul	Jumlah pembayaran langganan surat kabar	12 bulan							
	Kab. Bantul	Jumlah pembayaran langganan internet	12 bulan							
	Kab. Bantul	Jumlah perpanjangan STNK kendaraan dinas	17 unit							
Penyediaan rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi	Kab. Bantul	Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah	950 op	660,035,124	Penyediaan rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi	Kab. Bantul	Jumlah jamuan rapat	850 orang	407,528,203.00	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Kab. Bantul	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	250 op			Kab. Bantul	jumlah jamuan tamu	220 orang		
	Kab. Bantul	Jumlah makan minum rapat	1250 om			Kab. Bantul	koordinasi perjalanan dinas dalam daerah	513 op		
	Kab. Bantul	Jumlah makan minum tamu	300 om			Kab. Bantul	koordinasi perjalanan dinas luar daerah	122 op		
Penyediaan jasa pengelola pelayanan perkantoran	Kab. Bantul	Jumlah pembayaran jasa tenaga non ASN	150 ob	355,000,000	Penyediaan jasa pengelola pelayanan perkantoran	Kab. Bantul	jumlah honor tenaga kontrak	144 ob	319,599,840.00	
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kab. Bantul	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 persen	1,028,512,169	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 persen	289,562,000.00	
Pemeliharaan rutin berkala / gedung kantor	Kab. Bantul	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	4 unit	285,112,125	Pemeliharaan rutin berkala / gedung kantor	Kab. Bantul	Pemeliharaan gedung kantor dan tempat parkir	2 unit	131,254,000.00	
		Jumlah pagar kantor yang dipelihara	1 unit							
		Jumlah tempat parkir yang dipelihara	1 unit							
Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Kab. Bantul	Jumlah kendaraan	17 unit	175,653,934	Pemeliharaan rutin/berkala	Kab. Bantul	Jumlah penggantian suku cadang	19 unit	93,858,000.00	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
		dinas yang dipelihara			kendaraan dinas/operasional		kendaraan dinas dan servis			
		Jumlah BBM yang dibeli	10.000 liter				jumlah perpanjangan surat kendaraan dinas	19 unit		
							Jumlah pengadaan BBM	5962 liter		
Pemeliharaan rutin / berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Bantul	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	5 jenis	46,202,613	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	jumlah jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	5 jenis	20,000,000.00	
Pengadaan peralatan dan perlengkapan	Kab. Bantul	Jumlah peralatan kantor yang diadakan	(1) filling kabinet: 1 unit	521,543,497	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Kab. Bantul	Jumlah pengadaan laptop	2 unit	44,450,000.00	
			(2) laptop: 1 unit				Jumlah pengadaan komputer	2 unit		
			(3) printer: 2 unit				Jumlah pengadaan printer	2 unit		
			(4) monitor LED: 2 unit							
			(5) kamera: 1 unit							

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			(6) AC: 1 unit							
			(7) GPS: 1 unit							
			(8) sound system: 1 unit							
			(9) komputer: 2 unit							
			(10) aplikasi: 1 unit							
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kab. Bantul	Nilai Evaluasi Kinerja	85	134,384,748	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		Nilai Evaluasi Kinerja	85 angka	111,625,000.00	
Penyusunan laporan keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Kab. Bantul	Jumlah lapora keuangan yang disusun	1 dokumen	91,190,627	Penyusunan laporan keuangan, barang, kepegawaian, dan ketatausahaan	Kab. Bantul	honor pengelola keuangan dan kepegawaian	168 ob	111,625,000.00	
		Jumlah laporan barang yang disusun	1 dokumen				Survailance ISO 9001:2015	1 dokumen		
Pemutakhiran Data	Kab. Bantul	Jumlah software arsip data digital yang dipelihara	8 unit							
Program penataan, penguasaaan,	Kab. Bantul	Cakupan penyelenggar	96 persen	9,067,419,211	PROGRAM PENATAAN		Cakupan penyelenggara	96 angka	11,002,150,000.00	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah		aan pelayanan pertanahan dan ruang			PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH		an pelayanan pertanahan dan ruang			
Inventarisasi Tanah Kas Desa	Kab. Bantul	Jumlah desa dengan data base ter-update	75 desa	27,272,000	Inventarisasi tanah kas desa	Kab. Bantul	jumlah database tanah desa ter update	75 desa	31,850,000.00	
		Jumlah peserta sosialisasi inventarisasi tanah kas desa	80 orang				jumlah peserta sosialisai inventarisasi tanah kas desa	75 orang		
Persetifikatan dan sewa tanah pemerintah DIY	Kab. Bantul	Jumlah pendaftaran bidang tanah ke Kantor Pertanahan	60 bidang tanah	96,303,203	Persetifikatan dan sewa tanah Pemerintah DIY	Kab. Bantul	jumlah dokumen permohonan pendaftaran tanah	5 dokumen	7,048,675,000.00	
							jumlah pembebasan tanah perluasan Paseban	1 bidang		
Pemanfaatan Tanah SG	Kab. Bantul	Jumlah permohonan surat dokumen kekancingan/ rekomendasi Bupati	20 surat	53,844,008	Pemanfaatan Tanah SG	Kab. Bantul	Jumlah surat rekomendasi pemanfaatan SG	10 rekomendasi	31,625,000.00	
							Jumlah peserta sosialisasi pemanfaatan tanah SG	75 orang		

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
Penatausahaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten	Kab. Bantul	Jumlah verifikasi sertifikat tanah desa di Kabupaten Bantul	3.000 bidang tanah	3,700,000,000	Penatausahaan tanah Kasultanan dan tanah kadipaten	Kab. Bantul	jumlah verifikasi sertifikat tanah desa	3000 bidang	3,700,000,000.00	
		Jumlah tanah desa terdaftar di Kabupaten Bantul	500 bidang tanah				jumlah tanah desa terdaftar	500 bidang		
		Jumlah tanah kasultanan dan tanah kadipaten yang terdaftar	600 bidang tanah				jumlah tanah kasultanan dan tanah kadipaten terdaftar	600 bidang		
Penyiapan bahan pertimbangan teknis ijin penggunaan tanah kasultanan dan kadipaten	Kab. Bantul	Jumlah rekomendasi penggunaan tanah kasultanan dan kadipaten di Kabupaten Bantul	40 rekomendasi	190,000,000	Penyiapan bahan pertimbangan teknis ijin penggunaan tanah kasultanan dan kadipaten	Kab. Bantul	Jumlah rekomendasi penggunaan tanah kasultanan dan kadipaten	40 rekomendasi	190,000,000.00	
Pemanfaatan ruang satuan strategis kawasan makam raja-raja mataram di Imogiri	Kab. Bantul	Luas tanah untuk gapura yang dibebaskan	400 meter persegi	5,000,000,000						
Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Kab. Bantul	Angka penanganan konflik pertanahan	15 persen	234,712,795	PROGRAM PENYELESAIAN KONFLIK-KONFLIK PERTANAHAN		Angka penanganan konflik pertanahan	15 angka	222,750,000.00	
Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Kab. Bantul	Jumlah permasalahan yang ditangani / difasilitasi	15 kasus	34,712,795	penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Kab. Bantul	Jumlah fasilitasi penyelesaian	5 kasus	22,750,000.00	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
							permasalahan pertanahan			
							jumlah peserta sosialisasi konflik pertanahan	75 orang		
Penanganan keberatan dan sengketa pertanahan tanah kasultanan, tanah kadipaten dan tanah desa	Kab. Bantul	Jumlah desa dengan rekomendasi penanganan permasalahan tukar menukar tanah desa dengan tanah warga	5 desa	200,000,000	Penanganan keberatan dan sengketa pertanahan tanah kasultanan, tanah kadipaten, dan tanah desa	Kab. Bantul	Jumlah desa dengan rekomendasi penanganan permasalahan tukar menukar tanah desa dengan tanah warga	5 desa	200,000,000.00	
Program Perencanaan Tata Ruang	Kab. Bantul	Cakupan dokumen tata ruang yang sudah diperdakan	4 dokumen	2,581,153,414	PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG		Cakupan dokumen tata ruang yang sudah di-perda-kan	4 Dokumen	1,815,825,000.00	
Penyusunan kebijakan tentang penyusunan rencana tata ruang	Kab. Bantul	Jumlah dokumen rencana tata ruang yang disusun	1 dokumen	89,088,000	Penyusunan kebijakan tentang penyusunan rencana tata ruang	Kab. Bantul	Bahan Raperda RTRW	1 Dokumen	169,100,000.00	
Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL	Kab. Bantul	Jumlah raperda RDTR yang disusun	3 dokumen	174,165,000	Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL	Kab. Bantul	Bahan Raperda RDTR Perkotaan dan RDTR Perdesaan	2 Dokumen	278,200,000.00	
Studi tentang Tata Ruang	Kab. Bantul	Jumlah dokumen study tata ruang/RTH yang disusun	1 dokumen	63,125,414	Studi tentang Tata Ruang	Kab. Bantul	Dokumen Studi review Perbup Sempadan	1 Dokumen	118,525,000.00	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
							Jumlah peserta sosialisasi tata ruang	400 orang		
Penyusunan rencana induk satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten	Kab. Bantul	Jumlah dokumen rencana induk Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis	1 dokumen	500,000,000	Penyusunan rencana induk satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten	Kab. Bantul	Dokumen rencana induk yang tersusun	1 Dokumen	500,000,000.00	
Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten	Kab. Bantul	Jumlah RTBL Kawasan yang disusun	3 dokumen (1) RTBL Kawasan Giriloyo (2) RTBL Kawasan Banyusu murup (3) RTBL Kawasan Segoroyos o	750,000,000	Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten	Kab. Bantul	Dokumen RTBL Satuan Ruang Strategis yang tersusun	3 Dokumen	750,000,000.00	
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Kab. Bantul	Persentase efektifitas penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan tanah dan tata ruang pemanfaatan tanah dan tata ruang	77 persen	1,652,376,059	PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG		Persentase efektifitas penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan tanah dan tata ruang	77 persen	1,567,280,000 .00	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang	Kab. Bantul	Jumlah jenis konsolidasi tanah	2 jenis	813,034,000	Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang	Kab. Bantul	Sosialisasi Konsolidasi Tanah	5 kecamatan	904,000,000.00	
	Kab. Bantul	Jumlah pengendalian dan monitoring terhadap pemanfatan ruang	200 bidang tanah				Konsolidasi Tanah	200 bidang		
	Kab. Bantul	Jumlah audit pemanfaatan tanah tahun 2018	6 kecamatan				Konsultasi Audit Pemanfaatan Tanah (Banguntapan, Kasihan, sewon)	3 kecamatan		
							Monev PTSL	21 desa		
Pengembangan data pemanfaatan ruang	Kab. Bantul	Jumlah survey dan penentuan peta desa lokasi absolute tanah kas desa dan tanah SG	5 peta desa	417,137,000	Pengembangan data pemanfaatan ruang	Kab. Bantul	Survey dan Penentuan Lokasi Absolute Tanah Kas Desa dan Tanah Sultan Ground	11 peta	392,210,000.00	
							Jumlah peserta sosialisasi pemanfaatan tanah	281 orang		
							Jumlah publikasi	4 kali		
Pengembangan data pemanfaatan ruang	Kab. Bantul	Jumlah survey dan	5 peta desa	417,137,000	Pengembangan data pemanfaatan ruang	Kab. Bantul	Survey dan Penentuan	1 dokumen	295.070.000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
		penentuan peta desa lokasi absolute tanah kas desa dan tanah SG					Lokasi Absolute Tanah Kas Desa dan Tanah Sultan Ground			
							Jumlah peserta sosialisasi pemanfaatan tanah	1 dokumen		
							Jumlah publikasi	200 orang		
Pengembangan data pemanfaatan ruang	Kab. Bantul	Jumlah survey dan penentuan peta desa lokasi absolute tanah kas desa dan tanah SG	5 peta desa	417,137,000	Pengembangan data pemanfaatan ruang	Kab. Bantul	Survey dan Penentuan Lokasi Absolute Tanah Kas Desa dan Tanah Sultan Ground	200 orang		
							Jumlah peserta sosialisasi pemanfaatan tanah	21 desa		

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2020, dilakukan pula telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan melalui forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah dilakukan untuk menyelaraskan rumusan program/kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2020 dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2019.

Berdasarkan hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, usulan program dan kegiatan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.9
Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan
Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	Penyuluhan hukum tentang tanah	Desa Palbapang, Bantul	Penyuluhan tentang hukum tanah	1 paket	Musrenbang (PIK Kecamatan Bantul)
2	Pendataan ulang dan pemutakhiran data tanah kas desa Sitimulyo	Desa Sitimulyo, Piyungan	Data tanah kas desa 21 pedukuhan Desa Sitimulyo	1 paket	Musrenbang (PIK kecamatan Piyungan)

Dari hasil rekapitulasi usulan kecamatan melalui Musrenbang Kecamatan terdapat sepuluh usulan kegiatan tahun 2020 yang masuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul berasal dari Kecamatan Sanden, Pandak, Bantul, Banguntapan, Pleret dan Kecamatan Piyungan. Dari sepuluh usulan hanya dua usulan yang diakomodir oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang karena masuk dalam usulan prioritas kecamatan yang harus diampu OPD pada usulan kegiatan tahun anggaran 2020 yaitu kegiatan pendataan dan pemutakhiran data tanah Desa Sitimulyo Kecamatan Piyungan dan penyuluhan hukum tentang hukum tanah di Desa Palbapang Kecamatan Bantul.

BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2020, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam Rancangan RKP Tahun 2020 adalah "Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas" dengan Prioritas Nasional (PN) dan Program Prioritas (PP) yang ditetapkan dalam Rancangan RKP Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Prioritas Nasional dan Program Prioritas dalam Rancangan RKP Tahun 2020

Prioritas Nasional		Program Prioritas	
PN 1:	Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	PP 1:	Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan
		PP 2:	Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan
		PP 3:	Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas
		PP4:	Pengentasan Kemiskinan
		PP 5:	Pembangunan Budaya, Karakter, dan Prestasi Bangsa
PN 2:	Konektivitas dan Pemerataan	PP 1:	Perluasan Infrastruktur Dasar
		PP 2:	Penguatan Infrastruktur Kawasan Tertinggal dan Ketahanan Bencana
		PP 3:	Peningkatan Konektivitas Multimoda dan Antar Moda Mendukung Pertumbuhan Ekonomi
		PP4:	Peningkatan Infrastruktur Perkotaan
		PP 5:	Perluasan Teknologi Informasi dan Komunikasi
PN 3:	Nilai Tambah Ekonomi dan Kesempatan Kerja	PP 1:	Penguatan Kewirausahaan dan UMKM
		PP 2:	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Invesatasi di Sektor Riil
		PP 3:	Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja
		PP4:	Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
		PP 5:	Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi
PN 4:		PP 1:	Pemenuhan Kebutuhan Energi melalui Peningkatan EBT

Prioritas Nasional	Program Prioritas
Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup	PP 2: Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan
	PP 3: Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air
	PP4: Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan
	PP 5: Penguatan Ketahanan Bencana
PN 5: Stabilitas Pertahanan dan Keamanan	PP 1: Penguatan Kemampuan Pertahanan
	PP 2: Peningkatan Diplomasi Politik dan Kerjasama Pembangunan Internasional
	PP 3: Penguatan Sistem Peradilan dan Upaya Anti Korupsi
	PP4: Penanggulangan Narkotika, Terorisme, dan Peningkatan Kamtibmas
	PP 5: Peningkatan Keamanan Siber

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020, Tema Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah "Meningkatkan kualitas SDM dan Infrastruktur untuk Pengurangan Kemiskinan dan Ketimpangan Wilayah melalui Pembangunan Berkelanjutan" dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan,
2. Pemantapan ketahanan pangan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.
3. Peningkatan daya saing produk dan investasi daerah,
4. Percepatan pembangunan infrastruktur strategis dan pemerataan wilayah,
5. Pemantapan stabilitas keamanan dan ketertiban,
6. Pemantapan reformasi birokrasi.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang serta tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2016-2021, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2020

No	Tujuan	Sasaran	Target Tahun 2020
1	Menjaga daya dukung alam dan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan	Meningkatnya pemanfaatan ruang sesuai aturan	Jumlah dokumen tata ruang yang sudah diperdakan : 4 dokumen
			Persentase cakupan pengendalian tata ruang : 77%
			Cakupan sertifikasi tanah : 96%

BAB IV.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2020 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: **Dinas Pertanahan dan Tata Ruang**

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0103	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						3.383.105.000,00	1.978.754.472,00		
0103.32	PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG		Capaian	Cakupan dokumen tata ruang yang sudah di-perdakan	Dokumen	4,00	1.815.825.000,00	326.378.413,00		
0103.020401.32.001	Penyusunan kebijakan tentang penyusunan rencana tata ruang	Kabupaten Bantul	Keluaran	Raperda RTRW	Dokumen	1,00	169.100.000,00	89.088.000,00		Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
0103.020401.32.002	Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL	Kabupaten Bantul	Keluaran	Raperda RDTR Perkotaan dan RDTR Perdesaan	Dokumen	2,00	278.200.000,00	174.165.000,00		Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
0103.020401.32.038	Studi tentang Tata Ruang	Kabupaten Bantul	Keluaran	Dokumen Studi review Perbup Sempadan	Dokumen	1,00	118.525.000,00	63.125.413,00		Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
0103.020401.32.039	Penyusunan rencana induk satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten	Kabupaten Bantul	Keluaran	rencana induk SRS Kasultanan dan Kadipaten	Dokumen	1,00	500.000.000,00	0,00		Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
0103.020401.32.040	Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten	Kabupaten Bantul	Keluaran	RTBL Satuan Ruang Strategis	Dokumen	3,00	750.000.000,00	0,00		Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
0103.34	PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG		Capaian	Persentase efektifitas penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan tanah dan tata ruang	persen	77,00	1.567.280.000,00	1.652.376.059,00		

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0103.020401.34.001	Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang	Kabupaten Bantul	Keluaran	Konsolidasi Tanah	bidang	200,00	904.000.000,00	813.034.000,00		Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
				Audit Pemanfaatan Tanah (Banguntapan, Kasihan, sewon)	dokumen	3,00				
0103.020401.34.010	Pengembangan data pemanfaatan ruang	Kabupaten Bantul	Keluaran	Lokasi Absolute Tanah Kas Desa dan Tanah Sultan Ground	peta	11,00	392.210.000,00	417.137.000,00		Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
				publikasi pemanfaatan ruang	kali	4,00				
0103.020401.34.011	Pengawasan Pemanfaatan Ruang	Kabupaten Bantul	Keluaran	Digitalisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang	dokumen	1,00	271.070.000,00	422.205.059,00		Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
				Digitalisasi Audit Pemanfaatan Ruang	dokumen	1,00				
				rancangan fasad	dokumen	1,00				
				Fasilitasi pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang	desa	21,00				
0204	PERTANAHAN						12.594.882.043,00	9.029.013.362,00		
0204.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Capaian	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	angka	82,00	968.795.043,00	1.807.179.116,00		
0204.020401.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Kabupaten Bantul	Keluaran	alat tulis kantor	jenis	44,00	241.667.000,00	751.607.116,00		Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
				alat listrik dan elektronika	jenis	11,00				
				materai	lembar	820,00				
				peralatan kebersihan	jenis	14,00				
				pengisian tabung gas	tabung	10,00				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				pembayaran telepon, air, listrik, internet, surat kabar, sampah	bulan	12,00				
				pengadaan spanduk publikasi	unit	10,00				
0204.020401.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Kabupaten Bantul	Keluaran	laporan hasil rapat	laporan	34,00	407.528.203,00	700.572.000,00		Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
				jamuan tamu	orang	220,00				
				perjalanan dinas dalam daerah	op	513,00				
				perjalanan dinas luar daerah	op	122,00				
0204.020401.01.038	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Kabupaten Bantul	Keluaran	jasa tenaga kontrak	ob	144,00	319.599.840,00	355.000.000,00		Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
0204.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		Capaian	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	persen	100,00	289.562.000,00	1.028.512.169,00		
0204.020401.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kabupaten Bantul	Keluaran	Pemeliharaan gedung kantor dan tempat parkir	unit	2,00	131.254.000,00	285.112.125,00		Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
0204.020401.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kabupaten Bantul	Keluaran	suku cadang kendaraan dinas dan servis	unit	19,00	93.858.000,00	175.653.934,00		Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
				pembayaran pajak kendaraan dinas	unit	19,00				
				bahan bakar minyak	liter	5.962,00				
0204.020401.02.030	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Bantul	Keluaran	pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	jenis	5,00	20.000.000,00	46.202.613,00		Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0204.020401.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Kabupaten Bantul	Keluaran	laptop	unit	2,00	44.450.000,00	521.543.497,00		Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
				personal komputer	unit	2,00				
				printer	unit	2,00				
0204.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		Capaian	Nilai Evaluasi Kinerja	angka	85,00	111.625.000,00	91.190.627,00		
0204.020401.06.008	Penyusunan laporan keuangan, barang, kepegawaian, dan ketatausahaan	Kabupaten Bantul	Keluaran	jasa pengelola keuangan dan kepegawaian	ob	168,00	111.625.000,00	91.190.627,00		Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
				Survailance ISO 9001:2015	dokumen	1,00				
0204.16	PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH		Capaian	Cakupan penyelenggaraan pelayanan pertanahan dan ruang	angka	96,00	11.002.150.000,00	4.067.418.655,00		
0204.020401.16.009	Inventarisasi tanah kas desa	Kabupaten Bantul	Keluaran	database tanah desa ter update	bidang	15.644,00	31.850.000,00	27.272.000,00		Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
0204.020401.16.014	Persetifikatan dan sewa tanah Pemerintah DIY	Kabupaten Bantul	Keluaran	dokumen pendaftaran tanah	dokumen	6,00	7.048.675.000,00	96.302.647,00		Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
0204.020401.16.017	Pemanfaatan Tanah SG	Kabupaten Bantul	Keluaran	rekomendasi pemanfaatan SG	dokumen	10,00	31.625.000,00	53.844.008,00		Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
0204.020401.16.018	Penatausahaan tanah Kasultanan dan tanah kadipaten	Kabupaten Bantul	Keluaran	verifikasi sertifikat tanah desa	bidang	3.000,00	3.700.000.000,00	3.700.000.000,00		Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
				tanah desa terdaftar	bidang	500,00				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				tanah kasultanan dan tanah kadipaten terdaftar	bidang	600,00				
0204.020401.16.019	Penyiapan bahan pertimbangan teknis ijin penggunaan tanah kasultanan dan kadipaten	Kabupaten Bantul	Keluaran	rekomendasi penggunaan tanah kasultanan dan kadipaten	dokumen	40,00	190.000.000,00	190.000.000,00		Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
0204.17	PROGRAM PENYELESAIAN KONFLIK-KONFLIK PERTANAHAN		Capaian	Angka penanganan konflik pertanahan	angka	15,00	222.750.000,00	2.034.712.795,00		
0204.020401.17.001	penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Kabupaten Bantul	Keluaran	penyelesaian konflik pertanahan	kasus	5,00	22.750.000,00	34.712.795,00		Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
0204.020401.17.002	Penanganan keberatan dan sengketa pertanahan tanah kasultanan, tanah kadipaten, dan tanah desa	Kabupaten Bantul	Keluaran	penanganan permasalahan tukar menukar tanah desa dengan tanah warga	desa	5,00	200.000.000,00	2.000.000.000,00		Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

BAB V.

PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2020. Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul serta berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 dan mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2020. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2020. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Perangkat Daerah akan melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO